

## Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Pangan Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Anhar Nurdiansyah Harahap<sup>1</sup>, Sugianto<sup>2</sup>, Atika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence: [amharharahap3@gmail.com](mailto:amharharahap3@gmail.com)

Received: 12 Agustus 2024 | Revised: 10 Oktober 2024 | Accepted: 17 Oktober, 2024

### Keywords:

Price Control Policy;  
Community Purchasing Power,  
Traditional Market,  
PriceStability.

### Abstract

This research aims to examine the impact of food price regulation policies on people's purchasing power in South Labuhan Batu Regency. This research method uses a descriptive qualitative approach, which involves collecting data through interviews conducted with 5 traders and 15 buyers in traditional markets. Data analysis involves the process of data reduction, data writing, and verification to arrive at research conclusions. The research results show that policies aimed at controlling food prices contribute positively to price stability and increase people's purchasing power. Based on research results, traders recognize the benefits of price stability even though their profit margins are decreasing. The same thing is felt by fruit and fish sellers, who experience price stability but have to face high operational costs and decreasing profit margins. For consumers, this policy helps reduce the burden on household expenses, even though product quality and availability of goods are sometimes inconsistent. From an Islamic economic perspective, this policy is in line with the principles of justice and social welfare. Islam encourages a fair economic system, where the prices of goods are not only influenced by market forces but also take into account the welfare of the people.

### Kata Kunci:

Kebijakan Pengendalian Harga, Daya Beli Masyarakat, Pasar Tradisional, , Stabilitas Harga

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan pengaturan harga pangan terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan 5 pedagang dan 15 pembeli di pasar tradisional. Analisis data melibatkan proses reduksi data, penulisan data, dan verifikasi untuk sampai pada kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan harga pangan berkontribusi positif terhadap stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari para pedagang mengakui manfaat dari stabilitas harga meskipun margin keuntungan mereka menurun. Hal yang sama dirasakan oleh penjual buah dan ikan, yang mengalami stabilitas harga namun harus menghadapi biaya operasional tinggi dan penurunan margin keuntungan. Bagi konsumen, kebijakan ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meskipun kualitas produk dan ketersediaan barang kadang tidak konsisten. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Islam mendorong system ekonomi yang adil, di mana harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan pasar tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan umat.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah upaya dan perencanaan bersama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya perubahan stabil dalam kondisi ekonomi suatu kelompok selama jangka waktu tertentu menuju kondisi yang lebih baik. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi di suatu wilayah adalah meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Dalam upaya memajukan daerah, khususnya di negara berkembang, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penelitian dan memanfaatkan potensi masyarakat secara efektif melalui pembangunan ekonomi (Hasibuan dan Harahap 2022).

Pasar merupakan kegiatan ekonomi fundamental yang berfungsi sebagai mekanisme intrinsik untuk pertukaran barang dan jasa, praktik yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam mengangkat pasar ke status yang sangat penting dalam kerangka ekonomi. Pentingnya pasar secara intrinsik terkait dengan perannya sebagai media pertukaran barang dan jasa. Penting bagi individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip yang mengatur fiqh muamalah (Fuad, 2016). Volatilitas pasokan pangan dan variasi harga pangan pokok, khususnya kelangkaan beras di Indonesia, berpotensi memicu keresahan nasional. Oleh karena itu, berbagai langkah pemerintah telah ditetapkan untuk mengatur harga pangan, seperti pengelolaan harga beras melalui Bulog, intervensi pasar untuk mengawasi minyak goreng, dan impor yang bertujuan untuk menstabilkan harga gula dan gandum. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan diversifikasi tanaman pangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, yang membahas tentang promosi diversifikasi pangan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai katalis bagi percepatan diversifikasi konsumsi pangan (P2KP), dengan memanfaatkan sumber daya lokal melalui upaya kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Djaimi Bakce, Heriyanto, dan Elinur 2012).

Berikut ini merupakan pengeluaran rata-rata masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan:

**Tabel 1. Pengeluaran Rata-Rata Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Aspek	2021	2022	2023
Makanan	626.245	640.389	694.647
Bukan Makanan	533.948	490.376	562.969
Jumlah	1.160.194	1.130.765	1.257.616

Sumber: (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2024)

Dalam periode 2021 hingga 2023, pengeluaran rata-rata masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada kategori

makanan, yang meningkat dari Rp626.245 menjadi Rp694.647. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami fluktuasi, dengan penurunan di 2022, namun kembali naik di 2023. Peningkatan total pengeluaran dari 1.160.194 pada 2021 menjadi 1.257.616 pada 2023 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cenderung membaik, meskipun ketidakstabilan dalam pengeluaran bukan makanan mengindikasikan adanya ketidakpastian atau variasi dalam kebutuhan non-makanan. Kenaikan yang konsisten pada pengeluaran makanan mencerminkan prioritas yang terus meningkat terhadap kebutuhan pangan, yang berpotensi menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam aspek non-makanan, masyarakat masih mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Tantangan utama yang memengaruhi permintaan dan konsumsi pangan meliputi harga komoditas terkait yang fluktuatif dan terus meningkat, ketersediaan pangan yang semakin terbatas, serta tingkat pendapatan dan preferensi masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, penelitian yang berkaitan dengan pola konsumsi rumah tangga sangat penting, yang berfungsi sebagai komponen mendasar dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Secara teori, permintaan terhadap komoditas tertentu atau sekumpulan komoditas dibentuk oleh beberapa faktor, termasuk harga komoditas yang dimaksud, harga komoditas terkait, tingkat pendapatan, dan preferensi konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Djaimi Bakcer, Heriyanto, dan Elinur pada tahun 2012, Koutsonyanis berpendapat bahwa permintaan dapat dipahami sebagai fungsi yang dibentuk oleh banyak variabel, yang menyoroti sifatnya yang multivariabel. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi permintaan meliputi harga barang terkait, harga barang alternatif, pendapatan konsumen, dan preferensi (Djaimi Bakcer, Heriyanto, dan Elinur 2012). Pemerintah memegang peranan penting dan berdampak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan berbangsa yang lebih luas. Pengawasan dan tata kelola yang efektif sangat penting bagi kemajuan perekonomian bangsa (Alfianti et al. 2024). Pemerintah harus mendekati pengambilan keputusan dengan sangat cermat, karena konsekuensi kebijakan terhadap masyarakat memerlukan pertimbangan yang mendalam dari perspektif konsumen dan produsen (Nugraha et al. 2024). Pemerintah merumuskan kebijakan perpajakan melalui pengenaan berbagai pajak terhadap berbagai barang. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak atas barang impor sebagai sarana untuk melindungi produsen dalam negeri, sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk dalam negeri dengan harga yang lebih kompetitif (Tri Murni et al. 2024). Pemerintah memberlakukan kebijakan pengendalian harga yang bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen, sekaligus memitigasi laju inflasi. Hal ini dicapai melalui subsidi yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang kebutuhan pokok dan perusahaan yang sedang berkembang, sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka terhadap produk impor (Rawung, Rumagit, dan Supriyanto 2024).

Tema pemberdayaan ekonomi memegang peranan penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Monopoli pangsa pasar yang cukup besar tersebut berpotensi dieksploitasi secara tidak tepat. Beras, daging sapi, daging ayam, bawang merah, gula, cabai, kedelai, jagung, garam, dan minyak goreng merupakan beberapa jenis bahan pangan pokok yang harganya

terus melambung (Nawawi, Soemitra, dan Dalimunthe 2022). Terkait pengaruh kenaikan harga barang kebutuhan pokok terhadap daya beli masyarakat, telah dilakukan penelitian terdahulu yang oleh para ahli disebut sebagai penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh Sunardi, Roby Ikfilana, dan Ach. Imam Ali Bustomi pada tahun 2022 dengan judul Dampak Kenaikan Harga Barang terhadap Perekonomian Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga barang berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Sebagai respons, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan daya beli melalui program pemberdayaan petani dan kewirausahaan telah mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan sosial. Ke depannya, pemerintah akan menilai efektivitas program yang dianggap berdampak positif terhadap kehidupan individu. (Sunardi, Ikfilana, dan Bustomi 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Anis, Triana (2023) berjudul Analisis Dampak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Tingkat Pengeluaran Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, dengan fokus pada masyarakat di Desa Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan peningkatan pengeluaran masyarakat yang tidak proporsional terhadap tingkat pendapatan. Isu kenaikan harga kebutuhan pokok sangat memengaruhi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama mereka yang memiliki penghasilan yang pas-pasan dan tidak menentu, seperti petani, buruh tani, dan pekerjaan bergaji rendah lainnya. Sementara itu, bagi masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau penerima gaji bulanan, isu kenaikan harga kebutuhan pokok cenderung tidak terlalu memengaruhi pola pengeluaran mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sintia Azizah (2021) berjudul Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Tingkat Pengeluaran Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan mereka per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kenaikan harga kebutuhan pokok dianggap wajar. Namun, kenaikan tersebut harus didasarkan pada pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak seharusnya dimanfaatkan untuk menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan lain. Hal ini dikarenakan Islam menganjurkan asas keadilan yang menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi atau proses jual beli. Perspektif ekonomi Islam tentang pengeluaran masyarakat menunjukkan bahwa individu atau masyarakat mampu mengalokasikan pendapatannya sesuai dengan kebutuhan hidup, sebagaimana berpedoman pada asas hukum Islam yang telah dianjurkan. Warga Desa Singosari telah menyesuaikan praktiknya dengan tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok secara memadai. Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengeluaran masyarakat di Desa Singosari sesuai dengan asas hukum Islam, khususnya dalam menghindari pemborosan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga pangan. Mengkaji potensi kebijakan pangan dalam mendorong stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta menganalisis dampak kebijakan pengendalian harga terhadap daya beli di pasar tradisional Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Identifikasi komoditas memegang peranan penting dalam pembentukan kebijakan harga pangan. Ilham (2016) dan Besanko & Braeutigam (2011) menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan harga, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prioritas komoditas, penerapan kebijakan pendukung (seperti buffer stock, operasi pasar, dan ekspor/impor), serta peran lembaga. Pemilihan komoditas yang cermat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan memberikan pengaruh yang lebih signifikan dan efektif.

Dr. Supawi Pawengan (2018) mendefinisikan daya beli masyarakat sebagai kemampuan konsumen, dalam hal ini masyarakat, untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Fluktuasi dalam masyarakat berfungsi sebagai indikator daya beli. Peningkatan daya beli terlihat jelas ketika melampaui tingkat yang diamati pada periode sebelumnya, sedangkan penurunan tercermin dari kehadiran masyarakat yang lebih tinggi dalam hal daya beli dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pasar tradisional merupakan tempat yang nyata di mana pedagang dan konsumen bertemu untuk melakukan pertukaran barang. Pasar tradisional ditandai dengan keberadaan kios atau tempat penjualan, serta area terbuka yang didirikan oleh pedagang atau diawasi oleh pengelola pasar. Sebagian besar barang yang dijual terdiri dari komoditas pokok sehari-hari, termasuk bahan makanan seperti ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, dan daging, serta tekstil, pakaian, barang elektronik, jasa, dan berbagai produk lainnya. Pasar seperti itu masih marak di Indonesia, biasanya terletak di dekat lingkungan pemukiman untuk memudahkan akses bagi konsumen.

## **METODE**

Penelitian ini menguraikan dinamika hubungan antara responden dan penulis terkait dengan pengaruh yang ditemukan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Proses pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk wawancara melibatkan pelaku ekonomi di pasar tradisional, yang terdiri dari sampel 5 penjual dan 15 pembeli yang diperoleh menggunakan purposive sampling. Prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan proses reduksi data. Proses reduksi data berlangsung selama penelitian lapangan. Selama pengumpulan data, fase reduksi berikutnya melibatkan sintesis informasi, pengkodean, identifikasi tema, pembentukan kelompok partisi, dan penyusunan memo. Selain itu, informasi diartikulasikan melalui serangkaian pernyataan yang koheren dan metodis, yang memudahkan pemahaman. Pada akhirnya, data yang diperoleh menjalani verifikasi untuk memudahkan penarikan kesimpulan. (Yenni Samri Juliati Nasution, Rahmi Syahriza 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **A. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pangan**

Kewenangan pengaturan harga pangan dilimpahkan kepada Menteri Perdagangan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kebijakan ini akan mengatur tiga aspek khusus. Menteri Perdagangan diberi

tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan harga komoditas pangan pokok. Termasuk di dalamnya adalah beras, kedelai, jagung, ikan, daging ayam, telur, dan susu untuk balita. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres tersebut menjadi landasan hukum yang memungkinkan Menteri Perdagangan untuk melakukan intervensi pasar. Kebijakan ini penting untuk melindungi konsumen dan petani dari manipulasi harga dan masuknya komoditas impor yang didorong oleh pengusaha spekulatif (Srie Agustina 2015). Kedua, kebutuhan mendasar dalam gudang melampaui kebutuhan umum, karena Menteri Perdagangan berwenang untuk mengawasi stok dan logistik selama tiga bulan. Kementerian Perdagangan akan menetapkan peraturan tentang lamanya penyimpanan barang kebutuhan pokok. Di masa mendatang, dapat dibayangkan distributor tidak akan menahan barang untuk waktu yang lama. Selain itu, sangat penting bagi semua distributor barang kebutuhan pokok untuk terdaftar dengan benar. Menteri Perdagangan berwenang mengawasi pengelolaan kegiatan ekspor dan impor pangan. Kementerian Perdagangan secara historis telah menggunakan berbagai instrumen untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga barang-barang penting. Salah satu metode melibatkan sistem resi gudang (SRG). SRG berfungsi sebagai alat untuk menilai ketersediaan cadangan nasional, khususnya yang menyangkut komponen pangan penting seperti beras, gabah, dan jagung.

Setiap negara di seluruh dunia memiliki kapasitas untuk mencapai titik gejolak harga pasar. Baik yang tidak mencukupi maupun yang berlebihan. Jika kondisi ini terus berlanjut, stabilitas keuangan negara pasti akan menghadapi tantangan. Prinsip ini juga relevan di Indonesia, negara berdaulat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dinamis. Mengingat hal ini, tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia segera mencari metode untuk menstabilkan harga. Pemerintah memiliki berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mencapai stabilisasi harga, termasuk:

1. Menetapkan HET, yang merupakan singkatan dari Harga Eceran Tertinggi. Pemerintah sering menerapkan HET sebagai mekanisme untuk mengatur harga pangan yang menunjukkan volatilitas berlebihan atau menimbulkan risiko ketidakstabilan. Contoh ilustratifnya adalah minyak goreng. Jika tidak ada HET, harga minyak goreng bisa melonjak drastis, apalagi jika petani kelapa sawit tidak bisa menyelesaikan panennya, sehingga harga menjadi tidak stabil.
2. Penerapan perpajakan. Pajak memiliki sifat yang multifaset, yang mencakup berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi stabilitas. Aspek perpajakan ini berfungsi sebagai mekanisme yang dapat digunakan pemerintah untuk memengaruhi stabilisasi harga. Inflasi memang dapat diatur.
3. Penetapan harga tinggi Kebijakan yang sering diterapkan pemerintah adalah penetapan harga yang melebihi harga yang ditetapkan pasar bebas. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan harga minimum. Lebih jauh, strategi penetapan harga tinggi sering disebut sebagai kebijakan harga terendah.

Kebijakan pengendalian harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga di pasar, namun dampaknya bervariasi di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden dari

berbagai sektor, tampak jelas bahwa kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka.

Dari sisi pedagang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus (penjual sayur) dan Bu Rini (penjual daging ayam), kebijakan pengendalian harga pangan membantu menjaga harga tetap stabil dan mempermudah perencanaan penjualan. Bapak Agus mengakui bahwa stabilitas harga menguntungkan konsumen dan meningkatkan volume penjualannya, meskipun margin keuntungan menurun. Hal yang sama diungkapkan oleh Bu Rini, yang merasa harga daging ayam lebih stabil namun margin keuntungan tetap menurun akibat harga jual yang dikendalikan. Dalam konteks ini, stabilitas harga memang bermanfaat untuk menarik pelanggan, namun tantangan tetap ada dalam menjaga margin keuntungan yang memadai. Sementara itu, Pak Joko (penjual buah) dan Pak Anto (penjual ikan) juga merasakan dampak positif dari stabilitas harga, meskipun ada kendala yang dihadapi. Pak Joko mencatat bahwa harga yang stabil membantu menarik konsumen, tetapi margin keuntungan tetap tertekan. Pak Anto mengalami situasi serupa, dengan harga ikan yang lebih stabil tetapi biaya operasional tetap tinggi. Kedua responden ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mempermudah pengaturan stok dan perencanaan penjualan, tantangan dalam pengelolaan margin keuntungan tetap ada.

Di sisi lain, Bu Ani (penjual makanan siap saji) mengalami dampak yang serupa dengan penjual lainnya, di mana stabilitas harga bahan baku mempermudah perencanaan menu dan harga jual. Namun, margin keuntungan tetap menurun, memaksa Bu Ani untuk berkreasi dalam merancang menu dengan biaya produksi yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bermanfaat untuk konsumen, penjual kuliner harus menyesuaikan strategi mereka untuk mempertahankan profitabilitas.

Bagi konsumen seperti Siti Marni dan Budi Santoso, kebijakan ini memberikan manfaat dalam bentuk penurunan harga pangan yang membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, mereka juga mengamati bahwa kualitas produk sering kali menurun dan ketersediaan barang tidak selalu konsisten. Siti Marni, khususnya, merasakan bahwa pengendalian harga membantu mengurangi beban, tetapi tidak cukup signifikan untuk mengatasi semua tantangan pengeluaran rumah tangga. Budi Santoso, sebagai petani, berharap agar kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan petani, agar tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga mendukung pendapatan petani.

## **B. Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Pangan Terhadap Daya Beli Masyarakat**

Kebijakan pengendalian harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah mendapatkan tanggapan beragam dari para responden, yang menggambarkan dampak yang berbeda-beda terhadap daya beli masyarakat. Bapak Agus, seorang penjual sayur dengan pengalaman 10 tahun, memandang kebijakan ini positif karena membantu konsumen mendapatkan harga sayur yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, beliau merasakan tantangan dari sisi pedagang, seperti margin keuntungan yang menyusut. Keuntungan dari stabilitas harga sering kali dikompensasi dengan penurunan margin keuntungan, yang memaksa pedagang menjual lebih banyak untuk mencapai keuntungan yang sama. Selain itu, Bapak Agus harus

menyesuaikan strategi penjualan dengan cara mengatur stok dan memberikan diskon untuk menarik pelanggan.

Senada dengan Bapak Agus, Bu Rini, penjual daging ayam, juga merasakan dampak positif dari segi stabilitas harga. Beliau mengakui bahwa kebijakan ini membuat harga lebih terprediksi dan membantu konsumen dalam perencanaan anggaran. Namun, Bu Rini merasa bahwa kebijakan ini sedikit merugikan bisnisnya karena margin keuntungan yang lebih kecil. Dalam upaya menyesuaikan diri, Bu Rini harus lebih kreatif dalam menawarkan promo dan paket hemat. Perubahan dalam pengelolaan stok menjadi lebih teratur, namun hubungan dengan pemasok juga memerlukan negosiasi yang lebih intensif untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

Di sisi lain, Pak Joko, penjual buah, merasakan keuntungan dan kerugian yang seimbang dari kebijakan ini. Harga yang stabil memudahkan konsumen untuk merencanakan belanja, namun margin keuntungan penjual menjadi lebih kecil. Pak Joko harus lebih gencar dalam melakukan promosi dan memberikan diskon untuk mempertahankan volume penjualan. Selain itu, pengelolaan stok menjadi lebih baik, dan hubungan dengan pemasok tetap terjaga dengan baik meskipun sering melakukan negosiasi.

Pak Anto, penjual ikan, menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan memberikan stabilitas harga yang menguntungkan konsumen tetapi menantang bagi pedagang ikan. Dikenal dengan fluktuasi harga yang sering terjadi karena cuaca dan kondisi laut, kebijakan ini membantu menstabilkan harga tetapi mengurangi margin keuntungan pedagang. Pak Anto harus lebih pintar dalam mengatur stok dan memberikan promo khusus untuk menarik pelanggan. Hubungan dengan pemasok tetap baik, tetapi negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik menjadi lebih sering.

Sementara itu, Bu Ani, penjual jasa kuliner, merasakan dampak yang lebih kompleks dari kebijakan ini. Stabilitas harga bahan baku memudahkan perencanaan menu dan harga jual, namun margin keuntungan menurun karena harus menyesuaikan harga jual dengan harga bahan baku yang dikendalikan. Pengelolaan stok menjadi lebih efisien, namun Bu Ani harus lebih kreatif dalam membuat menu yang tetap menarik dengan biaya produksi yang lebih rendah. Selain itu, harapannya pemerintah akan terus memantau harga dan memberikan subsidi untuk bahan baku kuliner agar harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian harga pangan memiliki dampak yang bervariasi terhadap daya beli masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan membantu konsumen, tantangan yang dihadapi pedagang dan produsen menunjukkan bahwa perlu adanya penyesuaian dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan pedagang dan aksesibilitas harga bagi konsumen. Adapun penuturan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pembeli di pasar tradisional di Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengenai kebijakan pengendalian harga pangan oleh pemerintah, seperti Bapak Sulaiman Nasution (46 tahun): "Saya merasakan sedikit perbaikan dalam harga pangan, tetapi masih ada barang yang harganya tidak sesuai dengan harapan. Kebijakan ini sedikit membantu dalam pengeluaran, namun seringkali saya



harus berbelanja di tempat yang berbeda untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kualitas produk umumnya baik, tetapi ketersediaan barang tidak selalu memadai."

Bapak Rahman Ali (35 tahun): "Kebijakan pengendalian harga pangan pemerintah sangat membantu dalam menjaga stabilitas harga, namun kami merasa harga masih fluktuatif dan tidak konsisten. Sejak kebijakan ini, kami mengalami beberapa perubahan harga, dengan beberapa barang menjadi lebih terjangkau namun ada juga yang harganya naik. Kualitas produk cenderung stabil, tetapi terkadang ketersediaan barang tertentu menjadi masalah."

Ibu Hani Ramdani (31 tahun): "Kebijakan pengendalian harga pangan cukup membantu dalam mengatur pengeluaran, meskipun terkadang ada kenaikan harga yang tak terduga. Kemampuan membeli kebutuhan pokok sedikit terpengaruh, tetapi secara umum barang masih bisa diperoleh dengan harga yang wajar. Saya berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan barang yang lebih baik."

Ibu Sri Agustina (52 tahun): "Perubahan harga pangan terasa, tetapi tidak selalu sesuai dengan harapan. Saya merasa lebih mudah mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau, namun ada juga kenaikan harga yang tidak bisa dihindari. Pengeluaran rumah tangga kami sedikit meningkat, namun masih dalam batas yang wajar."

Bapak Siswanto Hartono (48 tahun) : "Kebijakan ini membantu dalam mengatur pengeluaran, walaupun terkadang ada ketidakstabilan harga. Kami merasakan perubahan dalam kualitas produk, dengan beberapa barang menjadi lebih sulit ditemukan. Saya berharap pemerintah dapat lebih konsisten dalam pengendalian harga."

Pernyataan di atas telah mempertegas jawaban dari masyarakat sebagai pembeli di pasar tradisional Kabupaten Labuhan Batu Selatan menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan pemerintah memiliki dampak positif, tetapi masih menghadapi tantangan. Sebagian besar responden merasa bahwa kebijakan ini membantu dalam mengatur pengeluaran rumah tangga dengan stabilitas harga yang cukup baik, meskipun fluktuasi harga tetap terjadi untuk beberapa barang. Kualitas produk cenderung stabil, namun masalah ketersediaan barang tetap menjadi perhatian utama, dengan beberapa responden mengeluhkan ketidakstabilan harga dan kekurangan stok tertentu.

Sebagian besar responden mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga harga pangan dan memastikan ketersediaan barang. Meskipun ada beberapa penurunan dalam pengeluaran rumah tangga dan perbaikan dalam harga, harapan agar pemerintah lebih memantau dan memperbaiki kebijakan ini tetap tinggi. Secara keseluruhan, kebijakan ini dianggap membantu, tetapi memerlukan perbaikan untuk mengatasi fluktuasi harga dan masalah ketersediaan barang.

### **C. Harapan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Kesetabilan Harga Pangan**

Kebijakan pengendalian harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi berbagai aspek ekonomi masyarakat, dari konsumen hingga pedagang. Dari

pandangan para penjual yang diwawancarai, harapan masyarakat terhadap kebijakan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama.

Para penjual secara umum mengakui bahwa kebijakan ini membantu menjaga kestabilan harga pangan, yang sangat menguntungkan bagi konsumen. Menurut Bapak Agus, penjual sayur, dan Bu Rini, penjual daging ayam, stabilitas harga yang tercipta membuat konsumen merasa lebih nyaman dan sering berbelanja. Demikian pula, Pak Joko, penjual buah, merasa bahwa stabilitas harga memudahkan konsumen dalam perencanaan belanja mereka. Namun, mereka juga mengungkapkan bahwa stabilitas harga ini sering kali datang dengan pengorbanan dalam hal margin keuntungan yang lebih kecil. Dampak kebijakan terhadap volume penjualan terlihat positif. Baik Bapak Agus, Bu Rini, maupun Pak Joko melaporkan bahwa volume penjualan mereka cenderung stabil atau bahkan meningkat sedikit. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan mampu menarik lebih banyak konsumen yang merasa harga menjadi lebih terjangkau. Penjual ikan, Pak Anto, dan penjual kuliner, Bu Ani, juga mengamati tren serupa, meski harus melakukan penyesuaian dalam strategi penjualan mereka.

Meskipun ada keuntungan dari stabilitas harga, para penjual juga menghadapi tantangan terkait margin keuntungan yang lebih kecil. Margin keuntungan yang menurun membuat beberapa pedagang harus menjual lebih banyak untuk mencapai keuntungan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus dan Bu Rini. Hal ini menuntut penjual untuk lebih kreatif dalam strategi pemasaran dan pengelolaan stok untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Pengelolaan stok barang menjadi lebih baik sejak kebijakan pengendalian harga diberlakukan. Pedagang melaporkan bahwa harga yang stabil membantu mereka dalam perencanaan pembelian dan pengelolaan stok. Tidak ada panicbuying atau kekurangan barang yang signifikan, seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional di lapangan.

## **Pembahasan**

Secara ringkas, kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan harga pangan telah menunjukkan kemajuan penting dalam membangun stabilitas harga dan meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan efektivitasnya, sangat penting untuk lebih fokus pada implementasi praktis dan mencapai keseimbangan yang harmonis antara kepentingan konsumen dan badan usaha. Pemerintah diharapkan untuk terus melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan ini, sambil juga mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatur harga pangan. Menanggapi kenaikan harga pangan, berbagai langkah dapat dilaksanakan, seperti: (Lestari & Winarto, 2023)

### **1. Menyelaraskan output dengan kebutuhan**

Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah, harus memprioritaskan peningkatan upaya produksi pangan.

### **2. Kemajuan sektor pertanian**

Langkah ini harus dilaksanakan dengan perspektif agribisnis untuk memastikan bahwa produksi pertanian mencapai nilai tambah dan daya jual yang signifikan.

### 3. Operasi Pasar

Pengendalian harga menandakan bahwa penetapan harga tidak sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar; Keterlibatan pemerintah justru sangat penting dalam menawarkan solusi alternatif di tengah skenario harga yang fluktuatif, tidak pasti, dan berulang.

### 4. Penurunan harga komoditas

Harga domestik yang tinggi, melampaui harga paritas impor, sering kali disebabkan oleh mekanisme produksi dan distribusi yang kurang optimal. Pengaturan stok oleh pemerintah memegang peranan penting dalam upaya menstabilkan atau menurunkan harga.

Dampak kebijakan pengendalian harga pangan terhadap daya beli masyarakat dapat sangat signifikan. Kebijakan ini sering kali diterapkan untuk menstabilkan harga pangan dan mencegah inflasi yang tidak terkendali, sehingga masyarakat, terutama golongan berpendapatan rendah, tetap mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau, daya beli masyarakat meningkat karena mereka tidak perlu mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin, memungkinkan mereka untuk membelanjakan uang mereka pada kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, kebijakan pengendalian harga juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti distorsi pasar, penurunan insentif bagi produsen, dan potensi kelangkaan barang jika harga yang ditetapkan terlalu rendah untuk menutupi biaya produksi. Harapan para penjual dan konsumen terhadap kebijakan ini di masa mendatang adalah agar kebijakan tersebut lebih konsisten dan diperbaiki pelaksanaannya. Para pedagang berharap adanya subsidi untuk membantu mereka menghadapi biaya operasional dan dukungan agar harga bahan baku tetap terjangkau. Sementara itu, konsumen menginginkan pengawasan yang lebih ketat agar kualitas produk tetap baik dan harga pangan tidak melonjak tinggi. Saran tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pengendalian harga pangan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dari perspektif pedagang, stabilitas harga memberikan keuntungan dalam perencanaan penjualan dan menarik pelanggan. Namun, pedagang menghadapi tantangan berupa margin keuntungan yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga yang stabil bermanfaat bagi konsumen, pedagang harus menyesuaikan strategi mereka untuk mempertahankan profitabilitas. Dari perspektif konsumen, kebijakan pengendalian harga pangan memberikan dampak positif berupa penurunan harga yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan pengendalian harga pangan selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini

dianggap sebagai langkah untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak adil, namun harus dilakukan dengan memastikan tidak merugikan pedagang dan mempertahankan kualitas serta ketersediaan barang. Pemerintah diharapkan terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ini untuk menciptakan keseimbangan yang optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## REFERENSI

- Alfianti, Nurrika Septa, Rini Puji Astuti, Ummah Habibah, Moh Yafis Shudur, dan Dani Triiswanto. 2024. "Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (5): 90–93.
- Atika, Saparuddin Siregar, dan Sugianto. (2023). Performance Analysis of Sharia Banking Using The Education Prism Method: Case Study Pt. Bank Muammalat Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. 2024. "Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2021-2023." 2024. <https://sumut.bps.go.id/indicator/154/176/1/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Djaimi Bakce, Djaimi, Heriyanto Heriyanto, dan Elinur Elinur. 2012. "Dampak Pengendalian Harga dan Peningkatan Pendapatan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pangan Pokok Rumahtangga di Provinsi Riau."
- Hakim, D. B., Harianto, H., & Nurmalina, R. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai terhadap Titik Ekuilibrium Rumahtangga Miskin Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(4), 799-808.
- Hasibuan, Muhammad Rezki Ripaldo, dan Rahmat Daim Harahap. 2022. "Analisis Pengembangan Ekonomi Di Kota Medan." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2 (8.5.2017): 2003–5. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com).
- Isharyanto. 2018. "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan Sebagai Hak Konstitusional dalam perspektif Negara Kesejahteraan".Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Konstitusi*.
- Ilham, N. (2006). Efektifitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Dampaknya Pada Stabilitas Ekonomi Makro. Disertasi Doktor IPB 2006.
- Ilham, N., & Siregar, H. (2007). Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25(1), 55-83.
- Lestari, Retnorita Dwi, dan Wahid Wachyu Adi Winarto. 2023. "Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kedungwuni." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 117–24.
- Nabila, Windi Jihan, Nurbaiti Nurbaiti, dan Muhammad Ikhsan Harahap. 2022. "Perilaku

- Konsumtif Mahasiswa Dalam Membeli Produk Fashion Syariah: Studi Kasus Mahasiswi FEBI UINSU.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (1): 93–105. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v3i1.2265>.
- Nawawi, Zuhrial M, Andri Soemitra, dan Mahfuzah Dalimunthe. 2022. “Women’s Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research.” *Iqtishadia* 15 (2): 255. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15902>.
- Nugraha, Ryan, Cut Risya Varlitya, Loso Judijanto, Saputra Adiwijaya, Irma Suryahani, Ina Agustini Murwani, Yunita Sopiana, Yoseb Boari, Titing Kartika, dan Fatmah Fatmah. 2024. *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rawung, Stanny Sicilia, Merry C N Rumagit, dan Supriyanto Supriyanto. 2024. *Buku Ajar Ekonomi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Retnawati Siregar, Pnadapotan Ritonga, Iskandar Muda, Andri Sumitra, Sugianto (2020). Professional Ethics and Responsibilities for Business Valuation, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Assets in Pharmaceutical Companies. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*.
- Septiadi, D., Harianto, H., & Suharno, S. (2016). Dampak kebijakan harga beras dan luas areal irigasi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 4(2), 91-106.
- Soemitra, Andri. 2021. “The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy: Islamic Economist Perceptions.” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10 (2): 329. <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9544>.
- Sunardi, Sunardi, Roby Ikfilana, dan Ach Imam Ali Bustomi. 2022. “Dampak Kenaikan Harga Barang terhadap Ekonomi Masyarakat.” In *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)*. Vol. 1.
- Tri Murni, Devi, Rahmalika Dara Fadilla, Amelisa Amanda, dan Syifa Unnisa. 2024. “Pengaruh Brand Dan Harga Dalam Keputusan Masyarakat Membeli Produk Thrifting Di Kota Jambi.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28 (6).
- Yenni Samri Juliati Nasution, Rahmi Syahriza, Marliyah. 2020. “Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga Di PTKIN SE SUMATERA.” *Kafaah Journal of Gender Studies* 10 (2): 1. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.
- Yuliana, R., Harianto, S. H., & Firdaus, M. (2019). Dampak Perubahan Harga Pangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 25-45.